



# WALI KOTA SUKABUMI

Sukabumi, 17 Mei 2024

Nomor : KU.10/ 939/IV/02/BPKPD/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada  
Yth. Kepala Perwakilan BPK  
Provinsi Jawa Barat

Di-

BANDUNG

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023, yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami sampaikan kepada BPK selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada BPK.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Sukabumi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2023.

PJ WALI KOTA SUKABUMI,



KUSMANA HARTADJI





**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Reff	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1.				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.a.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1	63.180.065.975,00	69.778.983.066,00	110,44	67.552.075.530,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2	5.869.354.800,00	6.402.303.741,00	109,08	6.217.864.368,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3	5.025.635.160,00	5.025.635.160,00	100,00	4.753.064.486,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4	314.233.872.303,00	326.332.548.016,00	103,85	284.764.023.672,00
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>388.308.928.238,00</b>	<b>407.539.469.983,00</b>	<b>104,95</b>	<b>363.287.028.056,00</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.b				
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.1.b.1				
10	Dana Bagi Hasil		76.601.663.255,00	66.787.300.065,00	87,19	80.509.876.615,00
11	Dana Alokasi Umum		467.753.891.013,00	488.663.655.967,00	104,47	461.492.442.500,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik		20.887.762.970,00	15.787.902.529,00	75,58	50.305.855.128,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		121.320.128.300,00	119.252.375.623,00	98,30	111.146.180.504,00
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>686.563.445.538,00</b>	<b>690.491.234.184,00</b>	<b>100,57</b>	<b>703.454.354.747,00</b>
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.1.b.2				
16	Dana Insentif Daerah		18.439.215.000,00	18.439.215.000,00	100,00	24.415.056.000,00
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
19	Dana Desa		-	-	-	-
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>18.439.215.000,00</b>	<b>18.439.215.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.415.056.000,00</b>
19	<b>TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH</b>	5.1.1.b.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil		84.631.397.588,00	76.052.907.987,00	89,86	81.934.803.641,00
21	Bantuan Keuangan		48.711.483.096,00	48.543.327.344,00	99,65	27.217.235.822,00
22	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>133.342.880.684,00</b>	<b>124.596.235.331,00</b>	<b>93,44</b>	<b>109.152.039.463,00</b>
23	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>838.345.541.222,00</b>	<b>833.526.684.515,00</b>	<b>99,43</b>	<b>837.021.450.210,00</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.c				
25	Pendapatan Hibah		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.317.000.000,00
26	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya		14.565.400.000,00	13.943.975.507,00	95,73	10.765.537.867,00
28	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>16.065.400.000,00</b>	<b>15.443.975.507,00</b>	<b>96,13</b>	<b>12.082.537.867,00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.242.719.869.460,00</b>	<b>1.256.510.130.005,00</b>	<b>101,11</b>	<b>1.212.391.016.133,00</b>

(dalam rupiah)

No.	URAIAN		ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
30	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
31	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	548.652.825.181,00	533.936.185.433,00	97,32	551.485.949.939,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	572.242.284.357,00	560.664.841.533,00	97,98	527.282.715.430,00
34	Belanja Bunga		-	-	-	-
35	Belanja Subsidi		-	-	-	-
36	Hibah	5.1.2.1.c	66.291.421.809,00	65.415.367.902,00	98,68	53.977.089.783,00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	7.601.763.540,00	7.391.500.000,00	97,23	7.608.300.000,00
38	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.194.788.294.887,00</b>	<b>1.167.407.894.868,00</b>	<b>97,71</b>	<b>1.140.354.055.152,00</b>
39	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
40	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	250.000.000,00	249.900.000,00	99,96	200.000.000,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	42.078.098.310,00	39.062.946.457,00	92,83	34.119.976.823,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	16.027.076.570,00	10.104.680.774,00	63,05	16.245.084.484,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	51.071.654.800,00	49.848.463.219,00	97,60	51.223.673.708,00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	4.136.317.194,00	4.110.002.998,00	99,36	1.989.392.569,00
45	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	100.000.000,00	98.481.000,00	98,48	-
46	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>113.663.146.874,00</b>	<b>103.474.474.448,00</b>	<b>91,04</b>	<b>103.778.127.584,00</b>
47	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
48	Belanja Tak Terduga		6.343.317.469,00	6.143.413.342,00	96,85	7.604.015.498,00
49	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>6.343.317.469,00</b>	<b>6.143.413.342,00</b>	<b>96,85</b>	<b>7.604.015.498,00</b>
50	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.314.794.759.230,00</b>	<b>1.277.025.782.658,00</b>	<b>97,13</b>	<b>1.251.736.198.234,00</b>
51	<b>TRANSFER</b>					
52	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>					
53	Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
54	Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	-
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
56	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
57	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	5.1.3	<b>(72.074.889.770,00)</b>	<b>(20.515.652.653,00)</b>	<b>28,46</b>	<b>(39.345.182.101,00)</b>

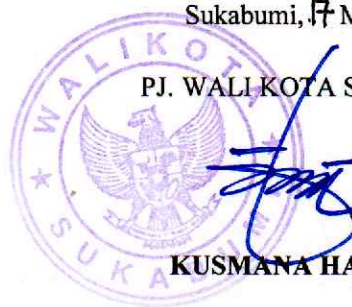
(dalam rupiah)

No.	U R A I A N		ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	( % )	REALISASI 2022
59	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.				
60	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	5.1.4.a				
61	Penggunaan SiLPA		75.574.889.770,00	75.574.889.770,00	100,00	120.841.900.131,00
62	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
63	Penerimaan kembali pinjaman - Dana Bergulir		-	5.000.000,00	-	950.000.000,00
64	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-
65	Penarikan Investasi Jk. Pendek		-	-	-	-
66	Pengembalian Dana Kemitraan		-	-	-	-
67	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>75.574.889.770,00</b>	<b>75.579.889.770,00</b>	<b>100,01</b>	<b>121.791.900.131,00</b>
68	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.b				
69	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	6.871.828.260,00
71	Pembayaran utang jangka panjang		-	-	-	-
72	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
73	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.871.828.260,00</b>
74	<b>Pembiayaan Neto</b>		<b>72.074.889.770,00</b>	<b>72.079.889.770,00</b>	<b>100,01</b>	<b>114.920.071.871,00</b>
75	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	5.1.5.	-	51.564.237.117,00	-	75.574.889.770,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



KUSMANA HARTADJI



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	75.574.889.770,00	120.840.911.331,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	75.574.889.770,00	120.841.900.131,00
3	Subtotal ( 1-2 )		-	(988.800,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3.	51.564.237.117,00	75.574.889.770,00
5	Subtotal ( 3+4 )		51.564.237.117,00	75.573.900.970,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	988.800,00
7	Lain-lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.4.	<b>51.564.237.117,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



**KUSMANA HARTADJI**





PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2023	2022
1	<b>ASET</b>	5.3.1.		
2	<b>ASET LANCAR</b>	5.3.1.1.		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	26.075.639.580,00	52.089.858.064,00
4	Kas di RK RSUD R. Syamsudin, SH (PPK-BLUD)	5.3.1.1.b	20.738.744.116,00	19.835.338.950,00
5	Kas di RK PKM Selabatu (PPK-BLUD)	5.3.1.1.c	419.509.898,00	523.393.329,00
6	Kas di RK RSUD AL MULK (PPK-BLUD)	5.3.1.1.d	2.400.602.770,00	2.742.154.492,00
7	Kas di Bendahara JKN	5.3.1.1.e	132.091.804,00	241.112.085,00
8	Kas di Bendahara BOK	5.3.1.1.f	1.353.356.967,00	-
9	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	8.544.200,00
10	Kas di Bendahara Dana BOS Pusat	5.3.1.1.g	388.288.714,00	110.154.381,00
11	Kas Lainnya	5.3.1.1.h	14.740.156,00	891.942,00
12	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.i	56.003.268,00	24.334.269,00
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.j	38.898.208.519,00	33.605.361.964,00
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.k	(19.045.652.183,00)	(17.265.313.827,00)
15	Piutang Pajak Netto		19.852.556.336,00	16.340.048.137,00
16	Piutang Retribusi	5.3.1.1.l	184.186.465,00	142.086.465,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.m	(70.580.865,00)	(73.389.465,00)
18	Piutang Retribusi Netto		113.605.600,00	68.697.000,00
19	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	5.3.1.1.n	2.003.828,00	2.003.828,00
20	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.o	314.882.628,00	432.606.561,00
21	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	5.3.1.1.p	3.027.502.178,00	4.099.812.816,00
22	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	5.3.1.1.q	11.961.398.000,00	-
23	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.r	229.192.000,00	230.952.000,00
24	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.1.s	(229.192.000,00)	(230.952.000,00)
25	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
26	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.1.t	13.136.227,00	13.136.227,00
27	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.1.u	(13.136.227,00)	(13.136.227,00)
28	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto		-	-
29	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.v	371.094.355,00	480.487.355,00
30	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.w	(368.844.355,00)	(477.962.355,00)
31	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		2.250.000,00	2.525.000,00
32	Piutang Lainnya	5.3.1.1.x	41.482.939.886,00	40.832.016.247,00
33	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.y	(31.825.860.915,00)	(21.013.881.610,00)
34	Piutang Lainnya Netto		9.657.078.971,00	19.818.134.637,00
35	Persediaan	5.3.1.1.z	28.294.556.680,00	21.205.738.605,00
36	<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>124.804.811.494,00</b>	<b>137.545.348.296,00</b>
37	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.3.1.2.		
38	Investasi Nonpermanen	5.3.1.2.a		
39	Pinjaman Jangka Panjang		-	-
40	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-
41	Investasi Dana Bergulir		345.000.000,00	350.000.000,00
42	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(297.500.000,00)	(260.000.000,00)
43	Investasi Nonpermanen Lainnya		-	-
44	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>		<b>47.500.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>
44	Investasi Permanen	5.3.1.2.b		
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		113.104.606.656,00	103.428.876.038,00
46	Investasi Permanen Lainnya		-	-
47	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>113.104.606.656,00</b>	<b>103.428.876.038,00</b>
48	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>113.152.106.656,00</b>	<b>103.518.876.038,00</b>

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2023	2022
49	<b>ASET TETAP</b>	5.3.1.3.		
50	Tanah	5.3.1.3.a	394.748.395.274,00	413.806.571.713,00
51	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	745.869.107.901,00	706.433.162.781,00
52	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	704.926.391.873,00	693.628.753.763,00
53	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.d	1.029.025.010.844,00	976.928.637.482,00
54	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	65.470.972.483,00	63.341.652.967,00
55	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	9.806.139.728,00	9.711.204.833,00
56	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.g	(1.515.413.410.072,00)	(1.414.233.653.280,00)
57	<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.434.432.608.031,00</b>	<b>1.449.616.330.259,00</b>
58	<b>ASET LAINNYA</b>	5.3.1.4.		
59	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
60	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
61	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
62	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
63	Tuntutan Ganti Rugi		-	-
64	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		-	-
65	Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	-
66	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.a	2.928.555.000,00	7.028.805.000,00
67	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.b	21.591.667.454,00	19.488.747.872,00
68	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.c	-	-
69	Aset Tak Berwujud Netto		21.591.667.454,00	19.488.747.872,00
70	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.d	22.284.428.314,00	23.834.648.991,00
71	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.e	(21.683.584.364,00)	(23.229.197.541,00)
72	Aset lain-lain Netto		600.843.950,00	605.451.450,00
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		9.777.067.000,00	8.262.174.065,00
73	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>34.898.133.404,00</b>	<b>35.385.178.387,00</b>
74	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.707.287.659.585,00</b>	<b>1.726.065.732.980,00</b>
75	<b>KEWAJIBAN</b>	5.3.2.		
76	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.3.2.1.		
77	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	13.860.514,00	-
78	Utang Bunga		-	-
79	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
80	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.b	813.803.295,00	536.277.500,00
81	Utang Belanja	5.3.2.1.c	1.398.998.116,00	1.126.375.963,00
82	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.d	36.297.118.991,00	22.496.379.901,00
83	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>38.523.780.916,00</b>	<b>24.159.033.364,00</b>
84	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.3.2.2.		
85	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
88	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
89	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-
90	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>38.523.780.916,00</b>	<b>24.159.033.364,00</b>
91	<b>EKUITAS</b>	5.3.3.	<b>1.668.763.878.669,00</b>	<b>1.701.906.699.616,00</b>
92	Ekuitas	5.3.3.1.	1.668.763.878.669,00	1.701.906.699.616,00
93	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.707.287.659.585,00</b>	<b>1.726.065.732.980,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 14 Mei 2024  
 PJ. WALI KOTA SUKABUMI  
  
 KUSMANA HARTADJI





**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022


(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2023	2022
1	Ekuitas Awal	5.6.1.	1.701.906.699.616,00	1.768.894.147.543,00
2	Surplus/Defisit-LO	5.6.2.	(27.002.849.008,00)	(69.515.353.578,00)
			1.674.903.850.608,00	1.699.378.793.965,00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.6.3.		
	3.1 Koreksi saldo awal piutang Non PBB		4.869.795,00	-
	3.2 Koreksi saldo awal piutang PBB		(179.538.475,00)	-
	3.3 Koreksi saldo awal piutang retribusi		32.250.000,00	-
	3.4 Koreksi Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(9.549.047.175,00)	2.251.827.495,00
	3.5 Koreksi saldo Investasi Jangka Panjang		6.175.730.618,00	7.256.201.809,00
	3.6 Koreksi Aset Tetap		(22.387.682.937,00)	2.520.551.621,00
	3.7 Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan		1.798.999.177,00	(5.567.754.839,00)
	3.8 Koreksi aset lainnya/Lain-lain		(1.681.423.199,00)	-
	3.9 Koreksi saldo Amortisasi aset tak berwujud		-	-
	3.10 Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain		1.676.815.699,00	-
	3.11 Koreksi Hutang Jangka Pendek/ Pend. Diterima dimuka		4.422.130.958,00	(4.316.561.308,00)
	3.12 Koreksi Piutang Lainnya		13.693.816.600,00	-
	3.13 Koreksi Saldo Awal Persediaan		-	298.040.873,00
	3.14 Koreksi Pendapatan Hibah		-	-
	3.15 Koreksi saldo awal bagian lancar TGR		(109.393.000,00)	(9.400.000,00)
	3.16 Koreksi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(37.500.000,00)	95.000.000,00
4	Ekuitas Akhir	05.06.04	<b>1.668.763.878.669,00</b>	<b>1.701.906.699.616,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI

  
KUSMANA HARTADJI



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
2	<b>PENDAPATAN</b>	5.4.1.				
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.4.1.1.				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	75.280.115.172,00	72.779.890.038,00	2.500.225.134,00	3,44
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	6.402.303.741,00	6.226.639.368,00	175.664.373,00	2,82
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.4.1.1.c	5.025.635.160,00	4.753.064.486,00	272.570.674,00	5,73
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.d	312.986.590.089,00	251.495.307.064,00	61.491.283.025,00	24,45
8	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>399.694.644.162,00</b>	<b>335.254.900.956,00</b>	<b>64.439.743.206,00</b>	<b>19,22</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>	5.4.1.2.				
11	Dana Bagi Hasil Pajak		42.933.040.000,00	49.554.735.215,00	(6.621.695.215,00)	(13,36)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		37.330.551.000,00	39.217.315.465,00	(1.886.764.465,00)	(4,81)
13	Dana Alokasi Umum		488.663.655.967,00	461.492.442.500,00	27.171.213.467,00	5,89
14	Dana Alokasi Khusus		135.040.278.152,00	161.452.035.632,00	(26.411.757.480,00)	(16,36)
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>703.967.525.119,00</b>	<b>711.716.528.812,00</b>	<b>(7.749.003.693,00)</b>	<b>(1,09)</b>
16	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Insentif Daerah		18.439.215.000,00	24.415.056.000,00	(5.975.841.000,00)	(24,48)
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>		<b>18.439.215.000,00</b>	<b>24.415.056.000,00</b>	<b>(5.975.841.000,00)</b>	<b>(24,48)</b>
20	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		74.980.597.349,00	79.445.051.268,00	(4.464.453.919,00)	(5,62)
22	Bantuan Keuangan		48.543.330.499,00	27.217.232.667,00	21.326.097.832,00	41,35
23	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>123.523.927.848,00</b>	<b>106.662.283.935,00</b>	<b>(4.464.453.919,00)</b>	<b>(4,19)</b>
24	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>845.930.667.967,00</b>	<b>842.793.868.747,00</b>	<b>3.136.799.220,00</b>	<b>0,37</b>
25	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.4.1.3.				
26	Pendapatan Hibah		14.258.579.207,00	15.000.680.354,00	(742.101.147,00)	(4,95)
27	Pendapatan Lainnya		13.943.975.507,00	10.765.537.867,00	3.178.437.640,00	29,52
28	<b>Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>28.202.554.714,00</b>	<b>25.766.218.221,00</b>	<b>2.436.336.493,00</b>	<b>9,46</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.273.827.866.843,00</b>	<b>1.203.814.987.924,00</b>	<b>70.012.878.919,00</b>	<b>5,82</b>
30	<b>BEBAN</b>	5.4.2.				
31	Beban Pegawai	5.4.2.1.	543.412.918.952,00	550.922.089.358,00	(7.509.170.406,00)	(1,36)
32	Beban Persediaan	5.4.2.2.	152.911.488.623,00	144.795.487.513,00	8.116.001.110,00	5,61
33	Beban Jasa	5.4.2.3.	280.419.941.480,00	268.372.945.458,00	12.046.996.022,00	4,49
34	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4.	56.194.773.971,00	56.932.985.951,00	(738.211.980,00)	(1,30)
35	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5.	40.908.862.628,00	35.308.224.007,00	5.600.638.621,00	15,86
36	Beban Bunga		-	-	-	-
37	Beban Subsidi		-	-	-	-
38	Beban Hibah	5.4.2.6.	65.770.724.502,00	54.199.089.783,00	11.571.634.719,00	21,35
39	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7.	7.391.500.000,00	7.608.300.000,00	(216.800.000,00)	(2,85)
40	Beban Penyusutan	5.4.2.8.	103.109.958.491,00	108.614.206.612,00	(5.504.248.121,00)	(5,07)

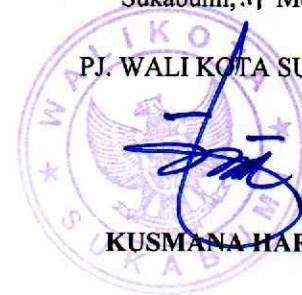
(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
41	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.4.2.9.	2.929.583.886,00	3.040.319.110,00	(110.735.224,00)	(3,64)
42	Beban Amortisasi Aset Tak berwujud		-	-	-	-
43	Beban Transfer		-	-	-	-
44	Beban Lain-lain	5.4.2.10.	47.780.963.318,00	43.536.693.710,00	4.244.269.608,00	9,75
45	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.300.830.715.851,00</b>	<b>1.273.330.341.502,00</b>	<b>27.500.374.349,00</b>	<b>2,16</b>
46	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	5.4.3.	<b>(27.002.849.008,00)</b>	<b>(69.515.353.578,00)</b>	<b>42.512.504.570,00</b>	<b>(61,16)</b>
47	<b><u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u></b>	5.4.4.				
48	Surplus Penjualan Aset non lancar		-	-	-	-
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
50	Defisit Penjualan Aset non lancar		-	-	-	-
51	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
52	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		-	-	-	-
53	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	-	-	-
54	<b><u>POS LUAR BIASA</u></b>					
55	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
56	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
57	<b>POS LUAR BIASA</b>		-	-	-	-
58	<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	5.4.5.	<b>(27.002.849.008,00)</b>	<b>(69.515.353.578,00)</b>	<b>42.512.504.570,00</b>	<b>(61,16)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



KUSMANA HARTADJI





## PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

## LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1.		
2	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		69.778.983.066,00	67.552.075.530,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.402.303.741,00	6.215.920.368,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.025.635.160,00	4.753.064.486,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		325.958.711.817,00	284.360.893.339,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		38.089.001.180,00	44.341.856.867,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		28.698.298.885,00	36.168.019.748,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		488.663.655.967,00	461.492.442.500,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		135.040.278.152,00	161.452.035.632,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		18.439.215.000,00	24.415.056.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		76.052.907.987,00	81.934.803.641,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		1.500.000.000,00	1.317.000.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya		62.487.302.851,00	37.982.773.689,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.256.136.293.806,00</b>	<b>1.211.985.941.800,00</b>
20	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
21	Pembayaran Pegawai		533.936.185.433,00	551.485.949.939,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		560.664.841.533,00	527.282.715.430,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		65.415.367.902,00	53.977.089.783,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		7.391.500.000,00	7.608.300.000,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
28	Pembayaran Belanja Tak Terduga		6.143.413.342,00	7.604.015.498,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
33	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.173.551.308.210,00</b>	<b>1.147.958.070.650,00</b>
34	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>82.584.985.596,00</b>	<b>64.027.871.150,00</b>
35	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>	5.5.2.		
36	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
37	Pencairan Dana Cadangan		-	-
38	Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	14.857.500,00
39	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		269.836.199,00	365.566.833,00
40	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		68.000.000,00	14.650.000,00
41	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
42	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		36.000.000,00	10.000.000,00
43	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
44	Pencairan Deposito 3 bulan		-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>373.836.199,00</b>	<b>405.074.333,00</b>

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
48	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
49	Pembentukan Dana Cadangan			-
50	Perolehan Tanah		249.900.000,00	200.000.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		39.062.946.457,00	34.119.976.823,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		10.104.680.774,00	16.245.084.484,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.848.463.219,00	51.223.673.708,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.110.002.998,00	1.989.392.569,00
55	Perolehan Aset Lainnya		98.481.000,00	-
56	Deposito 3 bulan		-	-
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.500.000.000,00	6.871.828.260,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
59	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>106.974.474.448,00</b>	<b>110.649.955.844,00</b>
60	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(106.600.638.249,00)</b>	<b>(110.244.881.511,00)</b>
61	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	5.5.3.		
62	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan		-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
71	Pencairan Dana Cadangan		-	-
72	Penerimaan Kembali Pinjaman		5.000.000,00	950.000.000,00
73	Penerimaan Piutang		-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
75	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>
76	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
86	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
87	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
88	Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	-
89	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
90	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
91	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	5.5.4.		
92	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
93	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		56.332.802.241,00	52.761.330.761,00
94	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>56.332.802.241,00</b>	<b>52.761.330.761,00</b>
95	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
96	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		56.332.802.241,00	52.761.330.761,00
97	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>56.332.802.241,00</b>	<b>52.761.330.761,00</b>
98	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>		-	-
99	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	5.5.5.	<b>(24.010.652.653,00)</b>	<b>(45.267.010.361,00)</b>
100	<b>Saldo Awal</b>	5.5.6.	<b>75.574.889.770,00</b>	<b>120.841.900.131,00</b>
	<b>Saldo Akhir</b>	5.5.7.	<b>51.564.237.117,00</b>	<b>75.574.889.770,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



KUSMANA HARTADJI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan pemerintah Daerah sendiri merupakan laporan konsolidasi antara laporan keuangan OPD (Organisasi perangkat Daerah) serta laporan keuangan dari PPKD (Pejabat Pengelola Kegiatan Daerah) proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dilaksanakan dengan menggabungkan atau mengkonsolidasikan antara laporan keuangan OPD serta laporan Keuangan PPKD.

#### **1.1.1 Maksud**

Maksud penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran (TA) 2023 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi bertujuan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Sukabumi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Kota Sukabumi untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### 1.1.2 Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Sukabumi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sukabumi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

#### **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian**

##### **Target Kinerja APBD**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan, dan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintah daerah.

##### **BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan. Serta memuat tentang hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas pos-pos laporan keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

#### **BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari: pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, komponen-komponen laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban, laporan perubahan ekuitas, aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### **BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yang terdiri atas; domisili dan bentuk hukum entitas, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya, penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen dan kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca, penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan dan kejadian yang mempunyai dampak sosial yang harus ditanggung pemerintah.

#### **BAB VII Penutup**

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi APBD Kota Sukabumi TA 2023 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.256.510.130.005,00 atau sebesar 101,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.242.719.869.460,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp1.277.025.782.658,00 atau sebesar 97,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.314.794.759.230,00. Dengan demikian Surplus/(Defisit) antara Pendapatan dan Belanja sebesar (Rp20.515.652.653,00);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sebesar Rp75.574.889.770,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp75.574.889.770,00. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan sebesar Rp51.564.237.117,00 sehingga SAL Akhir sebesar Rp51.564.237.117;
3. Neraca Pemerintah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp1.707.287.659.585,00; Kewajiban sebesar Rp38.523.780.916,00 dan Ekuitas sebesar Rp1.668.763.878.669 ,00;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kota Sukabumi TA 2023 menunjukkan Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar Rp1.273.827.866.843,00 dan Beban sebesar Rp1.300.830.715.851,00 sehingga menghasilkan defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp27.002.849.008,00. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 sehingga Surplus/(Defisit) LO sebesar (Rp27.002.849.008,00).
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp82.584.985.596,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp106.600.638.249,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp5.000.000,00 dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 sehingga terjadi penurunan kas selama periode TA 2023 sebesar Rp24.010.652.653,00. Saldo Awal Kas sebesar Rp75.574.889.770,00, Saldo Akhir Kas sebesar Rp51.564.237.117,00.
6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sukabumi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar



Rp1.701.906.699.616,00, Surplus/(Defisit) LO (Rp27.002.849.008,00) dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar negatif (Rp6.139.971.939,00) sehingga Ekuitas Akhir menjadi Rp1.668.763.878.669 ,00.

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



**KUSMANA HARTADJI**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi per 31 Desember 2023 (*audited*), penyusunan laporan keuangan ini merupakan salah satu pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah antara lain: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, serta dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (*audited*) secara teknis administrasi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Sukabumi No 105 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota sukabumi.

Demikian kami sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, semoga Laporan Keuangan yang kami susun dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selama satu periode pelaporan, serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI

  
KUSMANA HARTADJI